

PENGELOLAAN HUTAN KEMITRAAN UNTUK MENYEJAHTERAKAN RAKYAT (KASUS PHBM DI PERHUTANI BKPH PARUNG PANJANG, KPH BOGOR)

Community-Based Forest Management Partnership for Prosperity of the People (A Case Community Based Forest Management in Perhutani BKPH Parung Panjang, KPH Bogor)

**Mukhlas Ansori¹⁾, Endriatmo Soetarto²⁾,
Dudung Darusman³⁾, dan Leti Sundawati²⁾**

ABSTRACT

After the reform era, forest management approaches tend to change from state-based to community-based. Arising awareness about the importance of involving communities in forest management, it will not succeed without support from the community. Since 2001, Perhutani has implemented a partnership program in the form of CBFM (Joint Forest Management Society), designed to accommodate the dynamic and needs of the community. This paper aims to study the perception of society, equality of status of the community, and to formulate alternative forestry policy. This research was quantitative and qualitative research. Sample were taken purposively. Research location in Perhutani office (BKPH) of Parung Panjang, KPH Bogor. Public perceptions of CBFM are positive and able to increase revenue, income, absorb labour, and grow productive business. Biophysical condition are better with the following: the fire and illegal logging are reduced, and the rehabilitation of forest is better. However, it is difficult for the community to get water since Acacia mangium were planted. The level of community participation in planning and evaluation is low but high in the implementation. The pattern of partnership is asymmetrical because the decision-making is dominated by Perhutani officers. In the cooperative agreement, there are many inequalities positions. CBFM is derivative of developmentalist ideology contrary to the principles of community empowerment. The partnership is focused more on corporate interests, and is used as reducer of conflict. Policy scenarios of CBFM are institutional strengthening, acces to forest resources, equality in forest management partnership, and productive business.

Key words: community forestry, partnership, equality, institutional

PENDAHULUAN

Sejak Indonesia mengambil alih hutan Jawa dari perusahaan kolonial Belanda, *Bosch Wezen*, Perum Perhutani mengelola hampir seluruh hutan di Jawa. Melalui PP 30 Tahun 2003, Perhutani ditetapkan negara sebagai pengelola hutan di Jawa yang diberi tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan kegiatan pengelolaan hutan di wilayah kerjanya dengan memberikan pelayanan untuk kemanfaatan umum, memupuk keuntungan, dan menjaga kelestarian hutan.

¹⁾ Staf pengajar MKDU IPB

²⁾ Fakultas Ekologi Manusia, IPB

³⁾ Fakultas Kehutanan, IPB

Dalam pengelolaan sumber daya hutan yang dilaksanakan selama ini, keberadaan masyarakat terabaikan. Kemiskinan terus dirasakan rakyat yang tinggal di desa-desa sekitar hutan. Masyarakat sulit memanfaatkan sumber daya hutan karena kebijakan yang diberlakukan menutup akses masyarakat terhadap sumber daya hutan. Masyarakat sekitar hutan dianggap sebagai masalah yang mengganggu kelestarian hutan. Beberapa anggapan yang menyesatkan terhadap masyarakat di sekitar hutan adalah sebagai berikut: (1) jumlah penduduk di sekitar hutan hanya sedikit; (2) masyarakat sekitar hutan melakukan pemanfaatan sumber daya alam secara ilegal; (3) masyarakat selalu merusak hutan. Sementara banyak bukti menunjukkan bahwa masyarakat penghuni hutan dapat melindungi keanekaragaman hayati dan mengelola ekosistem setempat secara lestari (Lynch dan Talbott, 2001).

Negara sebagai penguasa hutan tetap memberlakukan peraturan perundang-undangan kehutanan peninggalan pemerintah kolonial Belanda seperti *domeinverklaring* yang mengklaim bahwa setiap tanah (hutan) yang tidak dapat dibuktikan adanya hak di atasnya menjadi *domain* negara. Pengalihan aset sumber daya alam dalam penguasaan negara terus menimbulkan konflik tenurial yang tak terselesaikan. Hak-hak masyarakat lokal tidak lagi diakui, penduduk yang secara turun-temurun menggantungkan hidupnya pada hutan tidak dapat lagi mengakses dan memanfaatkan sumber daya hutan. Konflik mencapai puncaknya saat terjadi reformasi politik tahun 1997-1999, ketika pemerintah lemah, okupasi lahan dan pembalakan liar terjadi di berbagai wilayah Perhutani.

Pada era reformasi terjadi perubahan sistem sosial politik antara lain: (1) semangat sentralistik menjadi desentralistik, (2) melemahnya wibawa pemerintah pusat di mata masyarakat, (3) munculnya suara dari rakyat yang menggugat kepemilikan sumber daya alam yang dikuasai negara, (4) munculnya pendekatan pengelolaan sumber daya alam dari *state based* menuju *community based*, (5) munculnya perlawanan kelompok masyarakat yang tersingkirkan melalui gerakan penjarahan hutan secara massif (Awang, 2003).

Perlawanan rakyat yang massif saat itu telah menghancurkan sistem pengelolaan hutan Perhutani. Hutan di Jawa dalam kondisi kritis karena tekanan masyarakat terhadap hutan dan keterbatasan kemampuan Perhutani baik lembaga maupun personalnya. Kerusakan hutan akibat penjarahan hutan pada awal masa reformasi seluas 160.000 hektar. Jawa Barat merupakan wilayah yang paling banyak terdapat lahan kritis (1,3 juta ha). Melihat kondisi hutan yang kritis, banyak pihak yang mempertanyakan pengelolaan hutan oleh Perhutani. Perhutani dianggap belum berhasil mengelola sumber daya hutan dari sisi ekologi, ekonomi, dan sosial.

Berbagai kritik, protes, dan perlawanan rakyat yang terus berlanjut mendorong menguatnya kesadaran baru tentang pentingnya melibatkan masyarakat dalam pengelolaan hutan. Mengelola hutan tidak mungkin berhasil tanpa dukungan dari masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan di Jawa sudah ada sejak masa kolonial Belanda. Mulai tahun 1873 sampai 1950 diterapkan sistem tumpang sari, kemudian tahun 70-an Perhutani melaksanakan *prosperity approach* berupa intensifikasi tumpang sari dalam pembuatan tanaman hutan, margasaren gaya baru, penanaman rumput gajah, ternak lebah madu, sutera alam, mantri hutan-lurah (Ma-lu), dan PMDH (Kartasubrata, 1998). Tahun 2001 Perhutani menerapkan program Pengelolaan

Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) sebagai bentuk kemitraan dalam pengelolaan hutan.

PHBM bagi Perhutani dianggap sebagai "obat mujarab" yang dapat menyelesaikan semua persoalan yang berkaitan dengan masyarakat sekitar hutan. Program ini merupakan kebijakan generik yang diberlakukan di seluruh wilayah dengan model yang sama. Dengan PHBM, diharapkan dapat menjaga kelestarian hutan, menguntungkan perusahaan, dan menyejahterakan rakyat. Dalam kenyataannya apakah PHBM sebagai sebuah pranata sosial yang baru dibentuk mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat sekitar hutan? Bagaimana persepsi masyarakat terhadap program ini; bagaimana kesetaraan kedudukan rakyat; bagaimana skenario kebijakan hutan kemasyarakatan yang ideal. Untuk menjawab berbagai masalah di atas dilakukan penelitian tentang pelaksanaan PHBM di salah satu wilayah Perhutani Parung Panjang, KPH Bogor. Tujuan makalah ini adalah mengkaji (1) persepsi masyarakat terhadap program PHBM (2) kesetaraan kedudukan petani dengan Perhutani, dan (3) merumuskan skenario kebijakan dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan di Perhutani BKP.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Perhutani KPH Bogor, Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Parung Panjang dengan luas 5.432,90 ha. Jenis tegakan yang mendominasi adalah *Acacia mangium*. Wilayah hutan ini terdiri dari Resort Pemangkuan Hutan (RPH) Tenjo, RPH Maribaya, dan RPH Jagabaya. Penelitian mulai dilaksanakan pada awal Juni 2008 sampai Desember 2009.

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dan kualitatif. Pengumpulan data kuantitatif dilakukan dengan survei menggunakan instrumen kuesioner. Penentuan sampel dilakukan secara *purposive* dengan memilih 3 desa, yaitu Babakan, Tapos, dan Ciomas. Jumlah responden sebanyak 60 responden. Pengumpulan data kualitatif dilakukan dengan wawancara dan wawancara mendalam. Informasi yang diperoleh dari informan kunci selanjutnya ditelusuri dengan *snowballing*. Pengumpulan data dari para pakar untuk memberikan *judgement* perbandingan berpasangan dalam proses AHP dilakukan dengan menggunakan kuesioner.

Penelitian ini adalah penelitian evaluatif yang digabung dengan pendekatan teori kritis. Untuk menganalisis data kuantitatif digunakan tabulasi silang dan uji chi square. Teori kritis digunakan untuk mengkritisi fenomena-fenomena yang terjadi dan mencari makna terselubung dibalik fenomena tersebut. Dalam Analisis AHP (*analytical hierarchy process*) untuk perumusan skenario kebijakan digunakan perangkat lunak Criterium Decision Plus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Persepsi Masyarakat terhadap PHBM

PHBM di BKP Parung Panjang KPH Bogor dimulai sejak tahun 2003 sampai sekarang dengan luas areal 931,55 hektar. Jumlah petani penggarap sebanyak 1.150 orang. Kerja sama dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan diformalkan dengan disepakatinya surat perjanjian kerja sama antara Perhutani dan kelompok tani hutan (KTH), atau lembaga masyarakat desa hutan (LMDH).

Karakteristik responden adalah anggota (KTH) mayoritas berumur 20 – 60 tahun. Tingkat pendidikan petani sangat rendah, rata-rata tidak lulus sekolah dasar. Pekerjaan utama responden adalah petani dan pedagang. Mayoritas penghasilan petani kurang dari Rp 500.000,00 per bulan. Luas lahan yang dimiliki kebanyakan petani kurang dari setengah hektar (92,45%), di bawah 0,25 hektar (35,85%), dan antara 0,25-0,5 hektar (56,6%). Lahan garapan yang dikelola dalam program PHBM juga sempit, umumnya luas lahan garapan di bawah 0,5 hektar sebagaimana terlihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Distribusi responden berdasarkan luas lahan (%)

Luas lahan	Milik	Garapan
< 0,25 ha	35,85	30,2
0,25 – 0,5 ha	56,6	49,05
0,51 – 1 ha	5,66	16,98
>1 ha	1,89	3,77
Total	100	100

Persepsi masyarakat terhadap PHBM bersifat positif. Masyarakat menganggap bahwa PHBM dapat meningkatkan penghasilan, menambah penghasilan, menyerap tenaga kerja, dan menumbuhkan usaha produktif. Melalui PHBM, masyarakat mendapatkan tambahan penghasilan dari menanam padi sekali tanam dan mengambil kayu bakar. Selain itu, penghasilan tambahan diperoleh dari *sharing* berupa kayu palen hasil dari penjarangan pertama, penjarangan kedua, dan tebang habis.

Variabel (peubah) yang berhubungan secara signifikan dengan penghasilan responden pada tingkat kepercayaan 95% (ditunjukkan dengan nilai *Asymp.Sig. (2-sided)* kurang dari 0,05) adalah tingkat pendidikan, pekerjaan utama, dan luas lahan milik.

Tabel 2. Hasil uji peubah yang berhubungan dengan penghasilan

Variable	Pearson Chi Square		
	Value	Df	Asymp.Sig. (2-sided)
Pendidikan	67,417	9	0,000 ***
Pekerjaan utama	29,840	15	0,013 ***
Lahan milik	59,453	9	0,000 ***
Pekerjaan sambilan	6,622	9	0,676
Lahan garapan	8,926	9	0,444

Untuk melihat hubungan antara pendapatan tambahan dari PHBM dengan peubah lainnya dilakukan uji *Chi Square* didapatkan hasil pada Tabel 3 sebagai berikut:

Tabel 3. Hasil uji peubah yang berhubungan dengan penghasilan tambahan

Variabe	Pearson Chi Square		
	Value	Df	Asymp.Sig. (2-sided)
Pekerjaan sambilan	0,357	3	0,949
Lahan garapan	13,367	3	0,004 ***

Tambahan penghasilan dari PHBM masih sedikit. Kayu bakar yang diambil dari hutan dijual dengan harga di bawah 100 ribu. Hasil *sharing* dari kayu palen pada penjarangan pertama kurang dari 250 ribu rupiah.

Pada stratifikasi sosial yang lebih tinggi, terdapat ketidakpuasan terhadap pelaksanaan PHBM. Pengurus LMDH beranggapan bahwa PHBM belum dapat menyejahterakan masyarakat. Bagi hasil yang diperoleh terlalu kecil. Implementasi PHBM melelahkan tanpa diimbangi penghasilan yang memadai. Usulan-usulan dari LMDH yang mengajukan berbagai bentuk usaha produktif belum diakomodasi.

Persepsi masyarakat terhadap kondisi biofisik hutan adalah sebagai berikut: kondisi hutan lebih baik, rehabilitasi hutan makin baik, kebakaran lebih jarang terjadi, erosi juga berkurang, dan pencurian juga berkurang. Akan tetapi, masyarakat menganggap bahwa sejak ditanamnya *Acacia mangium* sumber air semakin sulit diperoleh.

Kondisi hutan sekarang ini berbeda jauh dengan kondisi hutan sebelumnya. Pada masa orde lama hutan di Parung Panjang sangat lebat, didominasi pohon-pohon besar. Jenis tegakannya adalah pusa, mahoni, dan tambesu. Mata air banyak ditemukan di sekitar hutan; banyak rumput dan jamur merah yang dapat dikonsumsi masyarakat. Fauna yang banyak ditemukan adalah babi hutan, kelinci, ayam hutan, berbagai burung, ular, dan banyak ikan. Ketika jenis tanaman diganti dengan akasia; rumput tidak ada lagi; alang-alang juga kalah; jamur merah tidak ada lagi; babi hutan jarang ditemukan; burung makin jarang; ular piton masuk kampung mencari mangsa ayam penduduk.

Hasil uji *chi square* peubah yang berhubungan dengan kondisi hutan adalah tingkat kebakaran hutan dan peningkatan reboisasi seperti dalam Tabel 4.

Table 4. Hasil uji hubungan peubah yang berkaitan dengan lingkungan

Variabel	Pearson Chi Square		
	Value	Df	Asymp.Sig(2-sided)
Tingkat kebakaran	17,430	4	0,002 ***
Peningkatan reboisasi	12,743	2	0,002 ***
Ketersediaan air	1,396	2	0,497

Antara pelaksanaan program PHBM dan perencanaannya tidak menunjukkan hubungan yang signifikan. Akan tetapi, evaluasi program dengan perencanaan program memiliki hubungan yang signifikan. Sebaliknya, hubungan antara evaluasi program dan pelaksanaannya menunjukkan hubungan yang tidak signifikan.

Dari aspek sosial, keamanan hutan semakin membaik. Kebakaran hutan dan pencurian makin berkurang. Hasil uji *chi square* pada Tabel 5 antara kebakaran hutan dan giliran jaga terdapat hubungan yang signifikan pada tingkat kepercayaan 90%. Sebaliknya, hubungan antara pencurian kayu dengan giliran jaga pada Tabel 6 ternyata tidak signifikan.

Tabel 5. Hasil uji hubungan giliran jaga dengan kebakaran

Variabel	Pearson Chi Square		
	Value	Df	Asymp.Sig. (2-sided)
Giliran jaga	11,019	8	0,088

Table 6. Hasil uji hubungan giliran jaga dengan pencurian

Variabel	Pearson Chi Square		
	Value	Df	Asymp. Sig. (2-sided)
Giliran jaga	8,721	6	0,190

Partisipasi masyarakat dalam setiap program pemberdayaan mutlak diperlukan, tanpa adanya partisipasi, masyarakat hanyalah menjadi objek semata. Penempatan masyarakat sebagai subjek program mutlak diperlukan sehingga masyarakat akan dapat berperan serta secara aktif mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, hingga evaluasi program. Masyarakat lokal mengetahui apa permasalahan yang dihadapi dan potensi yang dimiliki oleh daerahnya dan mereka akan mempunyai pengetahuan lokal untuk mengatasi masalah yang dihadapinya. Midgley (1986) menyatakan bahwa partisipasi bukan hanya sekedar salah satu tujuan dari perubahan sosial, tetapi merupakan bagian yang integral dalam proses perubahan sosial. Kegagalan pembangunan berperspektif modernisasi mengabaikan partisipasi masyarakat.

Partisipasi masyarakat pada pelaksanaan PHBM tinggi, sedangkan pada hal yang terkait perencanaan dan evaluasi tingkat partisipasi masyarakat sedang bahkan rendah. Tingkat partisipasi dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7. Keterlibatan responden dalam kegiatan (%)

Keterlibatan	Ikut rencana	Ikut rapat rencana	Pelaksanaan	Ikut pengamanan	Evaluasi
Tidak	63,0	61,1	7,4	46,3	18,9
Ya	37,0	38,9	92,6	53,7	81,1
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Ketidaksetaraan Kedudukan

Perjanjian kerja sama antara masyarakat dan pihak Perhutani yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak dirumuskan sebelum keluarnya izin bagi pengelolaan hutan kemasyarakatan. Dengan adanya perjanjian kerja sama, pemeliharaan dan pengamanan tanaman dilakukan secara swadaya oleh masyarakat. Perhutani sesuai dengan fungsinya tetap melakukan fasilitasi dan pemantauan.

Dalam pelaksanaan program PHBM di BKPH Parung Panjang pada praktiknya masih terdapat ketidakseimbangan kedudukan. Pihak Perhutani masih mendominasi karena merasa paling berhak dan paling bertanggung jawab dalam pengelolaan hutan di kawasannya. Mandor sebagai petugas Perhutani sudah terbiasa dengan pekerjaan memerintah dalam penanaman, pemeliharaan, dan penebangan, belum dapat mengubah sepenuhnya sikapnya terhadap petani yang sekarang menjadi mitra kerja.

Hubungan antara mandor dan petani tidak selalu baik. Mandor terlihat tidak sungguh-sungguh dalam mengembangkan PHBM. Mandor masih dominan. Kebanyakan petani juga belum sadar akan kedudukannya sebagai mitra sejajar. Petani masih sebagai pengikut dan objek program, belum menjadi subjek yang menentukan pelaksanaan program. Tingkat pendidikan petani yang rendah merupakan salah satu faktor yang menyebabkan sulitnya terjadi perubahan sikap kebanyakan petani penggarap.

Ketidakharmonisan dalam pelaksanaan PHBM terlihat dari adanya perbedaan persepsi antara mandor dengan pengurus KTH/LMDH. Mandor menganggap penggarap tidak paham PHBM. Sebaliknya, pengurus kelompok menganggap bahwa mandor bekerja semaunya sendiri, sering melakukan kegiatan tanpa memberikan informasi kepada KTH atau LMDH. Kemitraan dalam PHBM terjadi dengan cenderung asimetris. Konsep perjanjian kerja sama dibuat oleh Perhutani. KTH/LMDH hanya membaca dan menyetujui konsep yang ada sehingga sangat terbuka adanya kepentingan-kepentingan dari Perhutani dalam draf yang disusunnya. Telaahan terhadap naskah perjanjian kerja sama menunjukkan adanya ketidaksetaraan kedudukan antara kelompok tani dan Perhutani. Adanya sanksi-sanksi yang menekan bagi petani merupakan indikasi adanya hubungan asimetris. Bahasa di dalam naskah perjanjian merupakan representasi dari pagelaran berbagai macam kekuatan. Bahasa merupakan salah satu ruang tempat berbagai kepentingan, kekuatan, dan proses hegemoni terjadi (Hikam, 1996).

Faktor keamanan hutan juga lebih banyak dibebankan kepada petani. Dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan sejak program tumpang sari sampai PHBM, sebenarnya belum mengalami perubahan filosofi yang berarti, belum menempatkan kedua pihak terkait, kehutanan dan petani pada kedudukan yang setara (Sambas, 2010).

Kesetaraan kedudukan dalam program PHBM belum terwujud karena keputusan dalam program didominasi Perum Perhutani. Padahal, kesetaraan merupakan hal terpenting untuk dapat mewujudkan kemitraan. Prinsip kesetaraan bagi *stakeholder* merupakan sebuah kunci keberhasilan dalam membangun kemitraan. Menurut Iswanto (1999), prinsip dasar kemitraan adalah saling percaya, kesamaan kepentingan dan tujuan, kesamaan pandangan tentang cara-cara pencapaian tujuan, pembagian tanggungjawab yang jelas, pembagian hak yang jelas, dan pembagian ongkos dan keuntungan yang adil berdasar kesepakatan bersama. Suksesnya kemitraan secara umum ditentukan oleh prinsip keadilan, tanggung jawab, transparan, mekanisme institusi, serta adanya keuntungan ekonomi dan finansial bagi semua *stakeholder* yang terlibat dalam kemitraan (Ichwandi dan Saleh, 2000).

Menurut Awang (1995) pengelolaan hutan selama ini dikelola dengan cara kapitalis dengan model-model produksi kapitalisnya. Legalitas penanaman modal oleh pengusaha hutan cenderung monopolitis terhadap pemanfaatan hutan, tetapi sangat kurang model yang mampu menjadi instrumen kesejahteraan masyarakat. Sistem pengelolaan SDH sangat dipengaruhi teori pembangunan modernis.

Program PHBM merupakan salah satu bentuk turunan dari kebijakan yang dikembangkan oleh para penganut paham modernis, dalam bentuk program CSR (*corporate social responsibility*). Program CSR muncul dari paham ekonomi liberal. Setelah eksploitasi sumber daya alam, digulirkan politik etis kepada masyarakat di sekitar perusahaan dengan santunan sekedarnya agar tidak mengganggu kepentingan usaha. Program PHBM merupakan modifikasi dengan melakukan perubahan pada tingkat pengelolaan dan teknis, sedangkan landasan filosofinya bertentangan dengan landasan pemberdayaan masyarakat yang bersifat emansipatif egaliter. Program pemberdayaan masyarakat belum dapat direalisasikan karena bias dengan misi utama untuk mengamankan hutan dan meredam konflik.

Program PHBM belum dapat memberikan akses yang lebih luas terhadap sumber daya hutan. Petani yang berlahan sempit berharap dapat mengkases lahan hutan untuk memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan masyarakat terhadap lahan makin mendesak untuk dipenuhi. Wacana adanya pemerataan pengelolaan sumber daya agraria perlu segera direalisasikan. Reforma agraria merupakan salah satu solusi yang dapat dipilih untuk realisasi pemerataan pengelolaan sumber daya agraria.

Skenario Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan

Berdasarkan analisis AHP, disusun prioritas kebijakan dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan. Skenario kebijakan dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan perlu mempertimbangkan aktor, faktor, strategi, dan tujuan. Aktor-aktor yang paling berperan dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan di BKPH Parung Panjang adalah Perhutani, masyarakat, pemerintah daerah, dan LSM. Faktor-faktor yang menjadi prioritas utama dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan adalah kebijakan, kelembagaan, ekonomi, sosial, dan lahan (Tabel 8).

Tabel 8. Hasil analisis level faktor

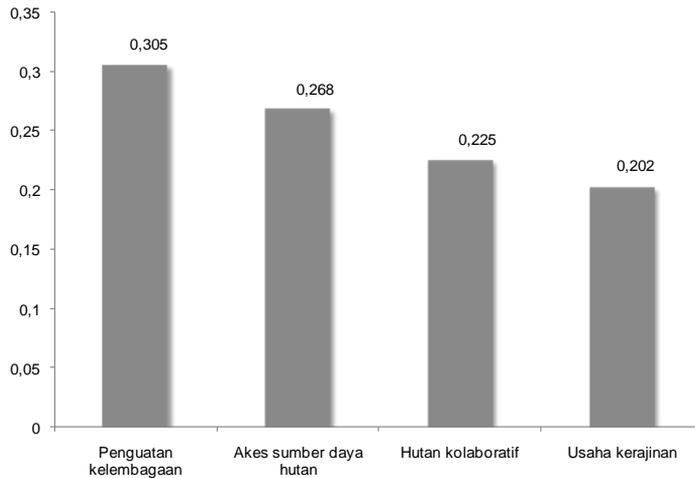
Level faktor	Kebijakan	Kelembagaan	Ekonomi	Sosial	Lahan
Penguatan kelembagaan	0,0712649	0,060389	0,0601038	0,0598043	0,0531851
Akses SDH	0,062192	0,0530278	0,053072	0,0531408	0,0468891
Hutan kolaboratif	0,0520157	0,0443521	0,0444493	0,0445512	0,0392685
Usaha kerajinan	0,0467474	0,0399135	0,0400572	0,040186	0,0353904

Strategi yang perlu dilakukan dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan lebih menekankan pada kepentingan rakyat. Strategi utama yang perlu dipertimbangkan adalah pendapatan masyarakat, mengurangi konflik, kelestarian hutan, usaha produktif, kesempatan kerja, dan profit perusahaan (Tabel 9).

Tabel 9. Hasil analisis level strategi

Level strategi	Kurangi konflik	Hutan lestari	Usaha produktif	Kesempatan kerja	Profit usaha	Pendapatan masyarakat
Penguatan kelembagaan	0,0793483	0,0613535	0,0491784	0,0430433	0,0360054	0,0358182
Akses SDH	0,0396741	0,0462783	0,0406581	0,0520634	0,0304306	0,0592171
Hutan kolaboratif	0,0337667	0,0316794	0,0346042	0,0366343	0,028735	0,0592171
Usaha kerajinan	0,0239992	0,0190967	0,0406581	0,0430433	0,0250997	0,0503975

Prioritas kebijakan dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan adalah perlunya dilakukan penguatan kelembagaan. Akses terhadap sumber daya hutan merupakan prioritas kedua. Selanjutnya, pengelolaan hutan kemitraan harus dilaksanakan secara adil dan demokratis, dan mengembangkan usaha produktif (Gambar 1).



Gambar 1. Prioritas kebijakan dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

- (1) Persepsi masyarakat terhadap PHBM dapat menambah penghasilan, tetapi tambahan penghasilan masyarakat masih relatif kecil akibat luas lahan garapan juga sangat sempit sehingga belum dapat menyejahterakan masyarakat. HBM juga menyebabkan kondisi biofisik sumber daya hutan menjadi lebih baik, kebakaran lebih jarang terjadi, rehabilitasi hutan semakin baik dan keamanan hutan lebih baik dengan berkurangnya pencurian.
- (2) Tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan evaluasi rendah, sedangkan partisipasi dalam pelaksanaan tergolong tinggi.
- (3) Terdapat ketidaksetaraan kedudukan antara petani dan Perhutani. Kemitraan dalam PHBM cenderung asimetris, sanksi-sanksi yang menekan diberikan kepada petani dan keamanan hutan lebih banyak dibebankan kepada petani.
- (4) Program pemberdayaan masyarakat belum dapat direalisasikan karena bias dengan misi utama untuk mengamankan hutan dan meredam konflik.
- (5) Alternatif kebijakan sebaiknya diprioritaskan pada penguatan kelembagaan, akses terhadap sumber daya hutan, pengelolaan hutan kemitraan yang adil dan demokratis, dan pengembangan usaha produktif.

Saran

- (1) Perlu diberikan akses yang lebih luas terhadap sumber daya hutan. Luas lahan garapan perlu ditingkatkan menjadi 2 hektar per petani.
- (2) Dalam pelaksanaan kemitraan perlu kesadaran untuk belajar bersama bagi petani dan petugas Perhutani.
- (3) Perlu realisasi pemerataan sumber daya agraria melalui reforma agraria.

DAFTAR PUSTAKA

- Awang SA. 1995. "Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Lokal dalam Program IDT" dalam Program IDT dan Pemberdayaan Masyarakat.
- Awang SA. 2003. *Politik Kehutanan Masyarakat*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Hikam AS. 1996. *Demokrasi Civil Society*. Jakarta: LP3ES.
- Iswantoro H. 1999. Konsep dan Strategi Kemitraan dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Prosiding Seminar Pemberdayaan Aset Perekonomian Rakyat melalui Strategi Kemitraan dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam. 1 September 1999. Pustaka Latin Jember.
- Ichwandi I dan Saleh MB. 2000. Towards Mutually Beneficial Partnership in Outgrower Schemes/Cost Benefit Analysis on Four Case Studies of Outgrower Schemes in Indonesia. Collaboration between the Center for International Forestry Research with Faculty of Forestry IPB.
- Kartasubrata J. 1998. *Social forestry dan Agroforestry di Asia*. Bogor: Laboratorium Sosek Kehutanan, Fakultas Kehutanan, IPB.
- Lynch OJ and Talbott K. 2001. *Keseimbangan Tindakan: Sistem Hutan Kerakyatan dan Hukum Negara di Asia dan Pasifik*. Jakarta: ELSAM.
- Midgley J. 1986. *Community Participation, Social Development and The State*. London: Methuen.
- Sambas. 2010. Petani sesungguhnya telah mempraktekkan agroforestri. Naskah Pidato pengukuhan guru besar UGM www.ugm.ac.id (1 –September 2010).